

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Peningkatan pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan (PPKT) guna memperkokoh kedaulatan NKRI, pelaksanaanya diperlukan upaya nyata bagaimana melakukan pembinaan wilayah melalui mekanisme pengamanan wilayah dan pengelolaan wilayah, serta penegakan hukum dan kedaulatan nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan tersebut. Pengamanan wilayah masih bertumpu pada TNI, khususnya TNI AL sebagai komponen utama. Selain itu, diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan belum efektif karena kurang solidnya antar pemangku kebijakan dan kepentingan. Sedangkan dari pendekatan manajemen organisasi diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pengamanan, pengelolaan, serta penegakan hukum belum cukup optimal karena belum adanya kesinambungan dan soliditas yang kuat dari aspek perencanaan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan (Aspek PDCA).

Penelitian yang dituangkan dalam Taskap ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya **Pertama**, pengamanan wilayah masih bertumpu pada TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra maritim, sedangkan TNI AL sendiri memiliki berbagai keterbatasan. Pengamanan wilayah dapat diperkuat melalui pelibatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan dalam upaya-upaya pertahanan negara sesuai dengan konsep Sishankamrata yang dianut oleh Indonesia. **Kedua**, pengelolaan wilayah yang dilakukan masih menemukan berbagai kendala yang cukup kompleks yang diakibatkan oleh belum sinergisnya seluruh pemangku kepentingan. Dibutuhkan penguatan pengelolaan wilayah dengan memperkuat fungsi dan peran pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. **Ketiga**, dalam konteks penegakan hukum dan kedaulatan (kedaulatan penuh dan hak berdaulat), pemerintah sudah melakukan langkah terpadu dengan menggunakan pendekatan regulatif, pendekatan institusional, serta pendekatan teknikal. Namun demikian, implementasinya belum cukup optimal karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat ditanggulangi

melalui pengelolaan wilayah dan masyarakat yang bersifat holistik, integral, dan terpadu.

18. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap ini, sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota supaya bekerja keras memikirkan dan mencari solusi terbaik agar tidak ada satupun pulau pulau terdepan kita yang tidak berpenghuni atau tidak dikelola dengan baik. TNI AL dan Bakamla harus lebih inten meningkatkan kehadiranya dikepulauan pebatasan terutama kepulauan laut Natuna utara. Pemerintah dan TNI harus memiliki tekad, visi dan misi yang sama demi kokohnya kedaulatan NKRI.

Kedua, pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan dapat diperkuat melalui pelibatan Kogabwilhan dan masyarakat melalui mekanisme komponen cadangan untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam mempertahankan wilayah maritim Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenhan RI dan TNI perlu duduk bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti POLRI, KKP RI, Kemendagri RI, serta Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) untuk membuat payung hukum kebijakan, bisa berupa UU baru untuk mekanisme kerja sama lintas kementerian, bisa juga berupa PP dan Permenhan RI yang mengatur teknis komponen cadangan matra laut.

Ketiga, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan merupakan kerja yang bersifat multidimensi serta lintas sektoral. Permasalahan pengelolaan wilayah selama ini disebabkan oleh kurang solidnya para pemangku kepentingan terkait, untuk itu dibutuhkan soliditas antar pemangku kepentingan agar pola pengelolaan wilayah bersifat holistik, integral, serta komprehensif di masa yang akan datang.

Keempat, penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan yang melibatkan banyak instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Ditjen Hubla Kemenhub RI, Ditjen PSDKP KKP RI, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, Bakamla RI, pelaksanaanya harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan untuk menyinergikan dan mengevaluasi kinerja berbagai lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)
- Bateman Snell, 2002. *Management Competing in the New Era*, Halaman. 425-426
- Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal: 72
- Donni Juni dan Suwatno. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Halaman. 182-183
- Fred Luthans, 2006. *Perilaku Organisasi*, Halaman. 492
- Kumalasari, Francisca Ayu. 2006. *Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegakknya Keutuhan Wilayah NKRI*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- KARDI, 2003, Majalah Angkasa, Edisi 8 Mei 2003
- Lemhannas RI. 2012. *Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta: Lemhannas RI. Halaman. 31-35
- Mabes TNI AL. 2018. Keputusan Kasal Nomor Kep 1111/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe. Jakarta: Mabes TNI AL. Halaman 31.
- Mulya, Lillyana. (2013). *Postur Maritim Indonesia: Pengukuran Melalui Teori Mahan*. Jurnal Lembaran Sejarah No. 2 (10), Oktober 2013
- Pushidrosal. 2018. "Laporan Perkembangan Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga Periode Tahun 2018 oleh Pushidrosal. Jakarta: Pushidrosal. Hal 1
- Sedarmayanti, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Halaman. 285
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. Halaman. 11.
- Wibowo, 2018. *Manajemen Kinerja*, Halaman. 414.

Jurnal

- Azizah, RR Zahroh Hayati. Mendef 1 Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 6(3), 2020. Hal. 94-144.
- Dirhamsyah. 2007. Penegakan Hukum Laut di Indonesia. *Jurnal Oseana LIPI*, Volume XXXII(1), 2007. Halaman 1-13

Sabarisman, Muslim. 2017. "Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir". *Jurnal Sosio Informa Volume 3(03), September-Desember 2017.* Halaman. 216-219

Sulasmi, Siti. Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerja Sama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Jurnal Ekuitas Vol. 13(2) Juni 2009.* Hal. 219-237

Internet

"Ada Apa di Laut Natuna Sampai Bikin RI Protes Keras China?", diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103082304-4-127288/ada-apa-di-laut-natuna-sampai-bikin-ri-protes-keras-china>

Anastasia Rita Trisiana Kuswardani, Keistimewaan Laut Indonesia: kekuatan dan Tantangannya, Mongabay Situs Berita Lingkungan (<https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-tantangannya/>).

"Apa Kabar Indoensia Sebagai Poros Maritim Dunia?", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/08062741/apa-kabar-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia?page=all>

Anggraini WS, Brigitta. 2014. *Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.* Universitas Atmajaya Yogyakarta. Diakses di <http://ejournal.uajy.ac.id/5024/1/jurnal.pdf>

"Definisi dan Tipe Pulau", diakses di <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4259-definisi-dan-tipe-pulau>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undangundang-nomor-17-tahun-1985#!>

<http://repository.uin-suska.ac.id/5726/3/BAB%20II.pdf>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/453/5/118220017_file5.pdf

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d3f18392f6607e8c3018f44e2d6bb497.pdf

[http://eprints.umm.ac.id/40138/3/BAB%20II.pdf,](http://eprints.umm.ac.id/40138/3/BAB%20II.pdf)

<https://eprints.uny.ac.id/18592/4/BAB%20II%2010417141029.pdf>

"Inilah Sejarah Kelam Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tangan Malaysia", diakses di <https://nasional.sindonews.com/read/269760/14/inilah-sejarah-kelam-lepasnya-pulau-sipadan-dan-ligitan-ke-tangan-malaysia-1608081124>

Jazilul Fawaid: Refleksi Hari Lahir Pancasila", diakses di <https://rri.co.id/nasional/politik/1065123/jazilul-fawaid-refleksi-hari-lahir-pancasila>

"Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", diakses di <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19048-karakteristik-masyarakat-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>

"Kejahatan Transnasional di Zona Panas Indonesia-Filipina", diakses di <https://zonautara.com/2017/06/07/kejahatan-transnasional-di-zona-panas-indonesia-filipina/>

Kelompok Kerja BHPN Kemenkumhan RI. 2015. "Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Jakarta: BPHN Kemenkumham RI. Halaman. 1-4. Diakses di

https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_wilayah_pesisir_r_dan_pulau-pulau_kecil.pdf

"Kenapa Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?", diakses di <https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/>

Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terdepan. Diakses di <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/PP%20KEPRES/Keputusan%20Presiden%20No.%206%20Tahun%202017.pdf>

Nainggolan, Poltak Partogi, dkk. 2012. "Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Indonesia". Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Halaman. V-XIV. Diakses di http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-7.pdf

"Negara Wajib Selamatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Nelayan Skala Kecil", diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/05/04/negara-wajib-selamatkan-ekonomi-masyarakat-pesisir-dan-nelayan-skala-kecil/>
"Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir", diakses di <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf>

"Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia", diakses di <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Diakses di <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/perpres-78-2005.pdf>

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diakses di <https://jdihn.go.id/files/4/2004uu034.pdf>

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Diakses di <http://www.bphn.go.id/data/documents/83uu005.pdf>

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009>



ALUR PIKIR

PENINGKATAN PEMBINAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN (PPKT) GUNA MEMPERKOKOH KEDAUULATAN NKRI

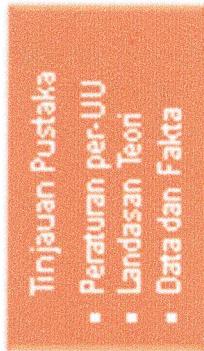


Rumusan Masalah :

Bagaimana meningkatkan pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan (PPKT) guna memperkokoh kedaulatan NKRI?

Pertanyaan Kajian

- Bagaimana pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan?
- Bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan?
- Bagaimana kontribusi peningkatan pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan terhadap kedaulatan NKRI?



Peningkatan Pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan



Pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan yg diharapkan



Kedaulatan NKRI Kokoh



KORPS MARINIR
DINAS ADMINISTRASI PERSONEL

KUTIPAN RIWAYAT HIDUP

N R P	: 9882/P		
N A M A	: ENDI SUPARDI., S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP.		
PANGKAT	: BRIGADIR JENDERAL TNI	KORPS	: MAR
TEMPAT / TGL. LAHIR	: MAJALENGKA , 09 - 07 – 1968	JENIS KELAMIN	: L
S U K U	: JAWA	AGAMA	: ISLAM
STATUS KAWIN	: K	JUMLAH ANAK	: 3
NOMOR ASABRI	: CC303196		
JABATAN	: KORMAR/WADAN		
A L A M A T	: JL. SIRSAK GUDANG BARU NO. 45 RT. 002/004 CIGANJUR JAGAKARSA JAK-SEL		



I PENDIDIKAN UMUM

SD TAMAT TH.1981
 SMP TAMAT TH.1984
 SMA TAMAT TH.1987
 S-1 MANAJEMEN STIMA IMMI JAKARTA TH 2018

II PENDIDIKAN MILITER

AAL-36 TH.1990
 DIKPASIS ANGK-3 TH.1991
 SUS SENBANIF TH.1992
 DIKSPESPA/INF ANGK-7 TA.1992/1993
 DIKREG XLI SESKO TNI TA. 2014
 SUSLAPA/INF TNI AD ANGK-1 TA.1999/2000
 DIK BEK MATRA LAUT TA.2000
 SESKOAL ANGK-41 TH.2003
 S-2 MAGISTER TERAPAN OPSLA,SESKOAL TH.2020
 PROFESI CHRMP,MKI COOPORATE UNIV-JKT TA.2021

III BAHASA ASING

INGGRIS P

IV BAHASA DAERAH

SUNDA A

V RIWAYAT PANGKAT

26-07-1990	LTD
01-10-1993	LT
01-10-1996	KPT
01-10-2001	MAY
01-10-2006	LTK

01-10-2010 KOL
 30-05-2017 BRIGJEN

VI RIWAYAT JABATAN

01-10-1990 KODIKAL/DPB
 01-08-1991 KORMAR/BRIGIF-1/YONIF-3/KIE E/TON-2/DAN
 01-12-1991 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KIE-D/TON-2/DAN
 01-06-1994 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KIMA/TON AT/DAN
 01-04-1996 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/PASI-3
 15-11-1996 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KI-F/DAN
 15-09-2001 KORMAR/DENMAKO/SOPS/PA
 15-12-2003 KORMAR/PASMAR-1/DENMA/DAN
 01-02-2005 KODIKAL/PUSDIKMAR/SEBA/DAN
 20-07-2006 KORMAR/PASMAR-2/BRIGIF MAR-2/YONIF-2/DAN
 01-08-2007 KORMAR/DENMAKO/DAN
 08-03-2010 KORMAR/DISMINPERS/KA
 07-02-2011 KORMAR/PASMAR-2/MENKAV-2/DAN
 08-02-2013 KORMAR/PASMAR-2/BRIGIF-2 MAR/DAN
 20-02-2014 KOARMABAR/SAHLI PANG/SAHLI "B" KOMSOS/(DIKREK XLI SESKO TNI TA.2014)
 21-11-2014 KORMAR/SPERS/AS
 14-04-2015 KORMAR/SRENA/AS
 17-03-2016 MABESAL/DENMA/DAN
 25-04-2017 KOARMABAR/LANTAMAL XII PTK/DAN
 14-02-2018 KORMAR/PASMAR-1/DAN
 25-01-2019 AAL/WAGUB
 26-04-2021 KORMAR/WADAN

VII RIWAYAT PENUGASAN

SATGAS NATUNA XIV TH.1991
 SATGAS TRISILA III TH.1994
 SATGAS RENSA VII NAD TH.1995
 SATGAS AMBON TH.1999
 SATGAS PIABUNG LAMPUNG TH.1997
 SATGAS PAM PEMILU TH.1997

VIII RIWAYAT KELUARGA

02-08-1976 NAWANG SARI (I)
 10-09-2000 MUHAMMAD FATHAN ALDINA YASKUR (A1)
 18-07-2002 FATIMAH AZZIRA ENDINASARI (A2)
 13-07-2006 AISYAH ENDINA KHAIRUNAZWA (A3)

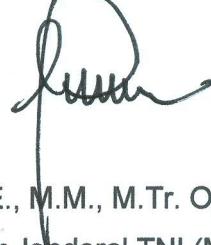
IX TANDA-TANDA JASA

BT. JALASENA NARARYA
 SL. WIRA DHARMA
 SL. GOM VII
 SL. DHARMA SAMUDRA
 SL. KESETIAAN VIII
 SL KESETIAAN XVI
 SL. KESETIAAN XXIV

SL. DHARMA NUSA
SL. DWIDYA SISTHA
SL. KEBAKTIAN SOSIAL
SL. WIRA KARYA
SL. WIRA NUSA
SL. DHARMA SAMUDRA

Jakarta, Agustus 2021

Wadan Kormar



Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr. Opsla, CHRMP
Brigadir Jenderal TNI (Mar)